



Darurat Sampah Plastik: Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Penanggulangan Sampah Plastik di Kota Denpasar

Ibnu Hajar

Universitas Udayana, Indonesia

Alamat: Jl. Pulau Nias No.13, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80113

Email : mozharisme@gmail.com

Abstract. *The plastic waste emergency in Denpasar reflects an ecological and social crisis due to the accumulation of single-use plastics. In response, the Bali Provincial Government issued Governor Regulation No. 97/2018, though its implementation remains limited. This study analyzes forms of community resistance to the policy and identifies structural causes and implications. Using a qualitative approach grounded in Cultural Studies, the research reveals resistance in passive, symbolic, and active forms, driven by information asymmetry, economic burdens, and lack of participatory policy-making. Findings show resistance as an articulation of agency within power/knowledge relations. The study concludes that environmental policy success depends on authentic public engagement as subjects of change.*

Keywords: *Plastic waste, resistance, public policy, Denpasar*

Abstrak. Darurat sampah plastik di Kota Denpasar mencerminkan krisis ekologis dan sosial akibat akumulasi sampah plastik sekali pakai. Pemerintah Provinsi Bali merespons dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018, namun efektivitasnya terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk resistensi masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan mengidentifikasi penyebab struktural serta implikasinya. Dengan pendekatan kualitatif berbasis Kajian Budaya, penelitian ini menemukan resistensi hadir dalam bentuk pasif, simbolik, dan aktif, dipicu oleh ketimpangan informasi, beban ekonomi, dan minimnya pelibatan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa resistensi merupakan bentuk artikulasi agensi masyarakat dalam konteks relasi kuasa dan pengetahuan. Studi ini menyarankan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada keterlibatan otentik masyarakat sebagai subjek, bukan objek perubahan.

Kata kunci: Sampah plastik, resistensi, kebijakan publik, Denpasar

1. LATAR BELAKANG

Krisis sampah plastik di Indonesia bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga merupakan gejala sosial-politik yang kompleks, mencerminkan relasi kuasa dalam produksi, konsumsi, pengelolaan lingkungan. Di kawasan negara yang berkembang, seperti Indonesia, persoalan krisis sampah diperparah akibat model pembangunan yang cenderung pada eksploitatif, selain itu lemahnya sistem tata kelola, juga termasuk ketimpangan pengambilan keputusan lingkungan (Ghosh, 2018). Sebagai kota urban sekaligus destinasi pariwisata, Denpasar menghadapi tekanan ekologis kompleks akibat akumulasi sampah plastik dari konsumsi harian dan aktivitas sektor informal. Situasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologi, tetapi juga menegaskan ketegangan antara wacana pembangunan hijau dan praktik keseharian masyarakat.. Data DLHK Prov Bali (2024) mencatat bahwa dari 360.000 ton timbulan sampah tahunan di Denpasar, sekitar 11,18% merupakan sampah plastik tidak terurai.

Sebagai bentuk intervensi negara, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP), yang kemudian diadopsi Pemerintah Kota Denpasar dalam regulasi turunannya. Kebijakan ini secara normatif ditujukan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai dan mendorong transisi menuju pola hidup berkelanjutan. Namun, pada tingkat akar rumput, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan mulus. Pasar tradisional, sektor informal, dan pelaku usaha mikro termasuk pedagang online masih menunjukkan praktik penggunaan plastik secara luas Greenpeace Indonesia. (2021). Kondisi ini menandakan bahwa persoalan yang muncul bukan sekadar kegagalan teknokratis, tetapi adanya friksi antara struktur kebijakan negara dan habitus sosial-ekonomi masyarakat.

Resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengurangan plastik tidak bisa direduksi menjadi sekadar pelanggaran hukum atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault (1980) dan James C. Scott (1993), resistensi merupakan respons kritis dan terkadang terselubung terhadap praktik kekuasaan yang dianggap mengabaikan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Di Denpasar, resistensi ini tampak dalam bentuk adaptasi simbolik, pembangkangan pasif, hingga negosiasi penafsiran ulang terhadap makna kebijakan itu sendiri menjadi cara masyarakat bernegosiasi dengan wacana negara yang seringkali memaksakan wacana “keberlanjutan” yang tidak sepenuhnya bersesuaian dengan logika hidup warga. Ketika nilai-nilai lokal seperti Sad Kertih dan Tri Hita Karana direduksi menjadi justifikasi kebijakan tanpa keterlibatan substantif masyarakat, maka terjadi proses hegemonik yang mengaburkan ketimpangan struktural (Bourdieu, 2020).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya krisis legitimasi dalam relasi anatar negara dan masyarakat, khususnya dalam wacana keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek teknis pengelolaan sampah, perubahan perilaku, ataupun partisipasi masyarakat dalam konteks normatif. Masih sedikit penelitian yang membahas resistensi sebagai bentuk artikulasi makna dan agensi dalam kerangka ekologi politik lokal. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang cukup penting untuk diisi, khususnya untuk memahami bagaimana resistensi masyarakat bukan hanya dilihat sebagai bentuk penolakan, melainkan juga sebagai produksi wacana, negosiasi identitas, dan perlawanan simbolik terhadap dominasi negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Denpasar? dan bagaimana resistensi tersebut mencerminkan dinamika kekuasaan, agensi, dan wacana budaya dalam praktik kebijakan lingkungan?

Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk resistensi terhadap kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Denpasar, serta menafsirkan makna resistensi tersebut dalam konteks relasi kuasa negara-warga, dengan pendekatan kritis Kajian Budaya yang menekankan dimensi diskursif, struktural, dan simbolik dalam konflik lingkungan kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Sampah Plastik: Krisis Ekologis dan Sosial-Politik

Fenomena sampah plastik telah melampaui isu lingkungan semata dan berkembang menjadi krisis ekologis dan sosial-politik yang kompleks. Di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan ini diperparah oleh model pembangunan eksploitatif, tata kelola yang lemah, dan ketimpangan dalam pengambilan keputusan lingkungan (Ghosh, 2018). Akumulasi sampah plastik sekali pakai, seperti yang terjadi di Denpasar sebagai kota urban dan destinasi pariwisata, tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologi tetapi juga menyoroti ketegangan antara wacana pembangunan hijau dan praktik keseharian masyarakat.

Krisis sampah plastik ini dapat dianalisis dari perspektif ekologi politik, yang melihat masalah lingkungan sebagai hasil dari interaksi antara proses sosial, ekonomi, dan politik (Peluso, 2012). Dalam konteks Denpasar, timbulan sampah plastik yang signifikan (11,18% dari total sampah tahunan berdasarkan data DLHK Prov Bali, 2024) bukan hanya masalah teknis pengelolaan sampah, melainkan cerminan dari pola konsumsi yang didorong oleh sistem ekonomi dan infrastruktur yang belum memadai. Hal ini menuntut pemahaman bahwa solusi tidak hanya terletak pada pendekatan teknis, tetapi juga pada analisis mendalam terhadap relasi kuasa yang melingkupi produksi, konsumsi, dan pengelolaan sampah.

B. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sebagai intervensi negara untuk mengatasi krisis ini (Pemerintah Provinsi Bali, 2018). Kebijakan publik, dalam teori, merupakan instrumen pemerintah untuk memecahkan masalah sosial dan mengatur perilaku warga. Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Dalam banyak kasus, implementasi kebijakan tidak berjalan mulus, terutama jika terdapat friksi antara struktur kebijakan negara dan habitus sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan yang bersifat normatif seringkali menghadapi tantangan dari realitas akar rumput, di mana pasar tradisional, sektor informal, dan pelaku usaha mikro masih masif menggunakan plastik

(Greenpeace Indonesia, 2021). Kegagalan implementasi ini bukan semata-mata kegagalan teknokratis, melainkan juga menunjukkan adanya simulasi kebijakan (Baaz et al., 2017), di mana regulasi ada secara formal tetapi gagal mengubah praktik sosial yang menjadi target perubahan. Hal ini dapat disebabkan oleh pengawasan yang lemah, sanksi yang longgar, dan minimnya insentif, yang semuanya berkontribusi pada rendahnya internalisasi norma kebijakan oleh masyarakat (Putri & Yulianto, 2022).

C. Resistensi Masyarakat: Agensi dalam Relasi Kuasa dan Pengetahuan

Konsep sentral dalam penelitian ini adalah resistensi masyarakat. Resistensi tidak dapat direduksi menjadi sekadar pelanggaran hukum atau kurangnya kesadaran lingkungan. Sebaliknya, resistensi dipahami sebagai respons kritis dan terkadang terselubung terhadap praktik kekuasaan yang dianggap mengabaikan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemahaman ini banyak dipengaruhi oleh pemikir seperti Michel Foucault dan James C. Scott, serta Pierre Bourdieu.

D. Kuasa-Pengetahuan (Power/Knowledge) Michel Foucault

Michel Foucault (1980) mengemukakan bahwa kuasa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif. Kuasa beroperasi melalui pengetahuan dan diskursus, membentuk cara kita memahami dunia dan mengatur perilaku. Dalam konteks kebijakan lingkungan, negara memproduksi wacana tentang "keberlanjutan" dan "darurat sampah plastik" yang diikuti dengan regulasi dan upaya pendisiplinan masyarakat. Namun, resistensi muncul ketika wacana dan praktik kekuasaan ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas hidup warga atau justru membebankan mereka.

Resistensi, dalam pandangan Foucault, adalah artikulasi agensi masyarakat yang menantang hegemoni wacana dominan. Ketika nilai-nilai lokal seperti Sad Kertih dan Tri Hita Karana direduksi menjadi justifikasi kebijakan tanpa keterlibatan substantif masyarakat, terjadi proses hegemoni yang mengaburkan ketimpangan struktural (Bourdieu, 2020). Bentuk resistensi seperti narasi tandingan (counter-discourse) merupakan cara masyarakat untuk menyampaikan bahwa kebijakan negara tidak sepenuhnya sesuai dengan pengalaman dan logika hidup mereka (Foucault, 1980). Foucault (1977) juga menambahkan bahwa kebijakan yang bertujuan mendisiplinkan perilaku warga seringkali tidak sepenuhnya berhasil, di mana warga menyeleksi bagian kebijakan yang dianggap relevan dan mengabaikan sisanya.

E. Habitus dan Modal Sosial Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu (2020) memperkenalkan konsep habitus sebagai sistem disposisi yang diinternalisasi individu dari kondisi sosial dan ekonomi mereka. Habitus membentuk tindakan, persepsi, dan preferensi seseorang. Dalam kasus pedagang yang enggan beralih dari kantong plastik, tindakan ini dapat dipahami sebagai cerminan habitus yang terbentuk dari kondisi ekonomi sehari-hari. Kepatuhan terhadap kebijakan dinilai berisiko secara ekonomi, sehingga pedagang memilih strategi yang lebih menguntungkan secara langsung, bahkan jika itu berarti melanggar aturan (Bourdieu, 2020). Selain habitus, konsep modal sosial dan modal ekonomi juga relevan. Tekanan ekonomi, seperti mahalnya kantong ramah lingkungan bagi pedagang kecil, membatasi pilihan rasional mereka. Pelanggaran aturan bisa menjadi bentuk adaptasi dalam situasi terbatas, bukan semata-mata pembangkangan. Penelitian ini akan menggali bagaimana modal-modal ini memengaruhi bentuk resistensi masyarakat.

F. Resistensi Sehari-hari (Everyday Resistance) James C. Scott

James C. Scott (1993) dalam karyanya *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* menyoroti bahwa resistensi seringkali bersifat sehari-hari, tersembunyi, dan non-konfrontatif (infrapolitics). Resistensi tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka langsung, melainkan melalui praktik-praktik kecil namun konsisten yang menandakan penolakan terhadap kekuasaan. Contohnya termasuk kepatuhan semu, partisipasi parsial, narasi tandingan, dan strategi menyiasati razia (Scott, 1993). Adiyanti (2021) dan Armadi (2021) juga mengkaji kepatuhan dan pengelolaan sampah di Bali yang bisa menjadi dasar perbandingan.

Scott berpendapat bahwa "naskah tersembunyi" (hidden transcripts) adalah kritik dan resistensi yang berkembang di antara kelompok subordinat yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka karena risiko sanksi. Resistensi ini menjadi cara masyarakat untuk bernegosiasi dengan wacana negara yang seringkali memaksakan wacana "keberlanjutan" yang tidak sepenuhnya bersesuaian dengan logika hidup warga. Studi ini akan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk resistensi ini beroperasi dalam konteks penanggulangan sampah plastik di Denpasar.

G. Implikasi Resistensi: Legitimasi, Efektivitas Kebijakan, dan Represivitas Negara

Resistensi masyarakat memiliki implikasi serius terhadap legitimasi dan efektivitas kebijakan lingkungan. Ketika warga merasa tidak dilibatkan secara bermakna (Sutanto, 2020), kebijakan dapat kehilangan legitimasi, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Li, 2007). Penurunan kepercayaan ini dapat menciptakan jarak antara negara dan warga, melemahkan basis sosial bagi keberhasilan kebijakan jangka panjang.

Widiantara (2022) juga menyoroti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di Bali yang seringkali antara retorika dan praktik.

Di sisi lain, respons negara terhadap resistensi seringkali mengambil bentuk tindakan represif, seperti razia dan sanksi administratif. Namun, pendekatan represif ini cenderung melihat resistensi sebagai bentuk pembangkangan yang harus ditekan, alih-alih sebagai ekspresi kritik atau partisipasi politik (Gaventa, 2006). Pendekatan ini justru dapat memperdalam jarak sosial dan melemahkan ruang deliberatif, sehingga menghasilkan efek kontraproduktif yang memperkuat sikap apatis masyarakat dan menghambat perubahan perilaku yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memahami secara mendalam mengenai dinamika resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang ada.

Penelitian difokuskan pada lokasi-lokasi yang merepresentasikan keragaman aktor dan bentuk resistensi, seperti pasar tradisional (Pasar Badung dan Pasar Sanglah), kawasan padat penduduk, serta warung dan toko kelontong yang masih bergantung pada plastik sekali pakai. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan intensitas penggunaan plastik dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, pedagang, pembeli, pemilik usaha mikro, tokoh adat, dan pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Denpasar. Teknik snowball digunakan untuk memperluas jejaring informan yang memiliki pengalaman atau pandangan kritis terhadap kebijakan yang ada. Wawancara dilakukan secara mendalam semi terstruktur, memungkinkan informan mengartikulasikan pengalaman dan narasi mereka secara bebas namun terarah. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan guna merekam praktik resistensi dalam konteks keseharian, baik yang bersifat tersurat maupun tersirat.

Sumber data sekunder mencakup dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, arsip media lokal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough, 2013), dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi kritis terhadap relasi antara wacana kebijakan dan praktik resistensi.

Dalam tahap interpretasi, kerangka teoritik yang digunakan mencakup: Teori kuasa-pengetahuan Foucault (1980), Teori habitus dan modal sosial Bourdieu (2020), Konsep resistensi sehari-hari dari Scott (1993).

Teknik triangulasi diterapkan untuk menjamin validitas data melalui kombinasi sumber, metode, dan waktu. Selain itu, member-check dilakukan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan informan. Reflektivitas peneliti juga menjadi aspek penting mengingat posisi subyektif peneliti sebagai bagian dari masyarakat di Bali yang mempelajari struktur budaya lokal. Dengan desain metodologis ini, penelitian ini berupaya akan mengungkap resistensi sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks dan kontekstual dalam kebijakan lingkungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. BENTUK-BENTUK RESISTENSI: DARI KEPATUHAN SEMU HINGGA SIMBOLIK

Resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengurangan plastik di Kota Denpasar tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh James C. Scott (1993), resistensi sering kali bersifat sehari-hari dan tersembunyi, berupa praktik kecil namun konsisten yang menandakan penolakan terhadap kekuasaan.

a. Penggunaan Kantong Plastik oleh Pedagang

Meskipun pemerintah telah berupaya mengantisipasi dengan menerbitkan kebijakan berupa larangan resmi melalui Pergub Bali No. 97 Tahun 2018, sebagian besar pedagang di Pasar Sumerta Kelod masih memberikan kantong plastik secara gratis. Dari 320 kios yang diamati, 64% tetap menyediakan plastik. Hal ini menunjukkan adanya resistensi pasif yang lebih dipicu oleh kebutuhan ekonomi.

“Kalau saya tidak kasih plastik, pembeli bisa pindah ke kios sebelah. Saya rugi nanti.” (Pedagang perempuan, 42 tahun).

Dalam pandangan Bourdieu, tindakan ini mencerminkan habitus yang terbentuk dari kondisi sosial dan ekonomi sehari-hari. Kepatuhan terhadap kebijakan dianggap berisiko secara ekonomi, sehingga pedagang memilih strategi yang lebih menguntungkan secara langsung.

b. Partisipasi Parsial dalam Pemilahan Sampah

Hanya 30% dari 342 responden yang secara rutin memilah sampah. Pemilahan lebih sering dilakukan jika ada keuntungan ekonomi, seperti penjualan sampah plastik kepada pengepul. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pemerintah tidak sepenuhnya didasarkan pada kesadaran ekologis.

“Kalau plastik bekas bungkus mie banyak, saya kumpulin, dijual. Tapi kalau cuma sedikit, ya buang aja sama sampah lainnya.” (Warga laki-laki, 37 tahun).

Menurut Foucault (1977), kebijakan yang bertujuan mendisiplinkan perilaku warga sering kali tidak sepenuhnya berhasil. Warga menyeleksi bagian dari kebijakan yang dianggap relevan dengan kehidupan mereka, dan mengabaikan sisanya.

c. Narasi Tandingan terhadap Wacana Resmi

Sebagian informan menganggap bahwa kebijakan larangan plastik lebih cocok diterapkan di lingkungan kelas menengah atau perkotaan, bukan di pasar tradisional.

“Kebijakan ini lebih cocok buat orang kota yang belanja di supermarket, bukan buat kami yang sehari-hari di pasar.”

Ungkapan ini merupakan bentuk wacana tandingan (counter-discourse), sebagaimana dijelaskan oleh Foucault (1980). Dengan cara ini, masyarakat menyampaikan bahwa kebijakan negara tidak sepenuhnya mencerminkan realitas hidup mereka.

d. Strategi Menyiasati Razia

Beberapa pedagang memilih untuk menghindari razia dengan cara berpindah tempat atau menyembunyikan kantong plastik.

“Kalau ada info razia, kami pindah dagang sebentar ke gang belakang.” (Pedagang sayur).

Scott (1993) menyebut strategi ini sebagai bagian dari infrapolitik, yaitu tindakan kecil yang secara diam-diam menantang kuasa negara. Meskipun tidak terlihat konfrontatif, strategi seperti ini menunjukkan adanya usaha mempertahankan otonomi di tengah tekanan aturan.

2. PENYEBAB RESISTENSI: KETIMPANGAN INFORMASI DAN TEKANAN SOSIAL EKONOMI

Resistensi terhadap kebijakan tidak terjadi tanpa alasan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa resistensi muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan akses informasi, beban ekonomi, dan infrastruktur yang belum mendukung.

a. Keterbatasan Informasi

Sebagian besar warga tidak memahami isi Pergub No. 97 Tahun 2018 secara menyeluruh. Informasi lebih banyak diperoleh melalui media sosial (40%) dan tidak selalu akurat.

“Saya tahunya dari Facebook, itupun nggak jelas. Tidak pernah ada orang datang jelaskan langsung ke pasar.” (Pedagang laki-laki, 51 tahun)

Minimnya komunikasi langsung menyebabkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kerangka demokrasi deliberatif (Dryzek, 2000), kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara terbuka dan partisipatif berisiko kehilangan legitimasi.

b. Tekanan Ekonomi

Kantong ramah lingkungan dinilai mahal dan tidak efisien untuk pedagang kecil.

“Satu tas kain bisa Rp3.000, sedangkan untung jualan saya kadang cuma Rp20.000 sehari.” (Pemilik warung)

Menurut Bourdieu, pilihan warga didasarkan pada kondisi struktural yang membatasi pilihan rasional mereka. Dalam situasi terbatas, pelanggaran aturan bisa menjadi bentuk adaptasi, bukan semata-mata pembangkangan.

c. Infrastruktur yang Tidak Mendukung

Sebagian warga yang telah memilah sampah merasa upaya mereka sia-sia karena sistem pengangkutan tidak membedakan jenis sampah.

“Sudah saya pilah, tapi diangkut sama truk campur semua. Buat apa saya repot-repot?” (Warga)

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Dalam kerangka Foucault, kekuasaan negara yang bersifat normatif gagal berfungsi jika tidak didukung oleh sistem dan sarana yang memadai.

3. IMPLIKASI RESISTENSI: TANTANGAN BAGI LEGITIMASI DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN

Resistensi yang berlangsung secara luas membawa dampak terhadap keberlanjutan kebijakan, kepercayaan masyarakat, dan relasi antara warga dan negara.

a. Implikasi Resistensi: Meningkatnya Darurat Sampah Plastik

Resistensi masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan sampah plastik di Kota Denpasar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akumulasi sampah plastik dan memburuknya kondisi ekologis perkotaan. Meskipun regulasi mengenai pembatasan plastik sekali pakai telah diterapkan melalui kebijakan daerah, implementasinya di tingkat akar rumput kerap bersifat simbolik, seremonial, dan tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Baaz et al. (2017) sebagai simulasi kebijakan, yaitu situasi di mana peraturan hadir secara formal, namun gagal mengubah praktik sosial yang seharusnya menjadi target perubahan. Dalam konteks ini, resistensi warga baik melalui penggunaan produk substitusi yang tetap berbahan dasar plastik maupun melalui toleransi pelaku usaha terhadap konsumen yang menolak penggunaan kantong ramah lingkungan menunjukkan rendahnya internalisasi norma yang diusung kebijakan. Hal tersebut merefleksikan keterbatasan kapasitas struktural dan hambatan kultural dalam mendorong transformasi perilaku. Dengan demikian, alih-alih menciptakan perubahan substantif, kebijakan justru terjebak dalam reproduksi simbolisme birokratis yang menghasilkan ilusi

perubahan, sementara krisis ekologis akibat sampah plastik terus berlanjut dan semakin kompleks.

b. Implementasi Lemah

Resistensi masyarakat terhadap kebijakan larangan plastik di Denpasar mencerminkan kegagalan negara dalam mentransformasikan regulasi menjadi perubahan praksis. Meskipun kebijakan telah disahkan, pelaksanaannya diwarnai simulasi administratif—sebagaimana dikemukakan Baaz et al. (2017)—dengan pengawasan lemah, sanksi longgar, dan minimnya insentif. Seorang pemilik warung menyatakan, “Saya tetap pakai plastik karena pelanggan tidak mau repot,” menunjukkan bentuk kepatuhan semu yang justru melanggengkan praktik lama. Survei juga mencatat 62% responden masih menerima kantong plastik, menandakan rendahnya internalisasi norma. Lebih dari sekadar ketidakpatuhan, resistensi ini mencerminkan keterputusan antara negara dan warga, di mana kebijakan dipersepsi sebagai instruksi sepihak, bukan hasil partisipasi. Akibatnya, legitimasi negara dalam isu lingkungan melemah, dan perubahan struktural yang dijanjikan tetap ilusif.

c. Menurunnya Kepercayaan terhadap Pemerintah

Resistensi masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan sampah plastik di Denpasar tidak dapat dilepaskan dari aspek kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika warga merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan, timbul persepsi bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Hal ini diperburuk oleh kesenjangan antara narasi pemerintah yang menekankan komitmen terhadap lingkungan dan kenyataan di lapangan yang menunjukkan lemahnya pengawasan serta penerapan yang inkonsisten. Dalam konteks ini, seperti yang dijelaskan oleh Li (2007), resistensi muncul bukan semata sebagai bentuk penolakan terhadap isi kebijakan, melainkan sebagai indikator dari menurunnya legitimasi negara sebagai representasi kepentingan kolektif. Ketika negara dianggap gagal menjalankan perannya secara adil dan partisipatif, masyarakat cenderung mengembangkan sikap skeptis dan bahkan sinis terhadap agenda-agenda pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Kepercayaan yang terkikis ini berisiko menciptakan jarak antara negara dan warga, sehingga memperlemah basis sosial bagi keberhasilan kebijakan jangka panjang. Dengan kata lain, resistensi terhadap kebijakan plastik mencerminkan bukan hanya kegagalan teknis dalam pelaksanaan, tetapi juga krisis kepercayaan yang lebih dalam terhadap institusi negara.

d. Represivitas Negara

Represivitas Negara: Resistensi yang Dibalas dengan Penertiban Respons negara terhadap resistensi atas kebijakan larangan plastik di Kota Denpasar seringkali mengambil bentuk tindakan represif, seperti razia dan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Pendekatan ini menandakan kecenderungan negara untuk memandang resistensi sebagai bentuk pembangkangan yang harus ditekan alih-alih dimaknai sebagai ekspresi kritik atau partisipasi politik warga. Padahal, seperti ditegaskan oleh Gaventa (2006), resistensi masyarakat seharusnya dibaca sebagai bentuk artikulasi suara dari kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak didengar dalam proses kebijakan. Dalam kerangka ini, tindakan represif justru memperdalam jarak sosial antara negara dan warga, sekaligus melemahkan ruang deliberatif yang esensial bagi demokrasi partisipatoris. Ketika negara lebih memilih jalan penertiban ketimbang perbaikan dialogis atas kebijakan, maka yang terjadi bukan hanya stagnasi pelaksanaan, tetapi juga delegitimasi moral dari otoritas negara itu sendiri. Dalam konteks penanggulangan sampah plastik, pendekatan represif tanpa disertai pembacaan atas akar resistensi dapat menghasilkan efek kontraproduktif—memperkuat sikap apatis masyarakat dan menghambat terciptanya perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman negara terhadap resistensi perlu direorientasikan dari paradigma kontrol menuju paradigma keterlibatan dan responsif terhadap aspirasi warga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Resistensi terhadap kebijakan pengurangan plastik di Denpasar merupakan respons yang kompleks terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan struktural. Masyarakat bukan sekadar menolak aturan, tetapi menyesuaikannya dengan konteks hidup mereka. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan harus lebih partisipatif dan adaptif bukan hanya menekankan kepatuhan, tetapi juga memperhatikan realitas sosial warga yang menjalankannya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengurangan plastik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan, tetapi sebagai hasil dari interaksi antara struktur sosial, kondisi ekonomi, dan cara negara mendistribusikan kekuasaan serta pengetahuan. Bentuk-bentuk resistensi yang bersifat sehari-hari, selektif, simbolik, dan taktis mencerminkan respons masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak komunikatif, dan tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan.

Secara teoretis, hasil ini memperkuat argumentasi Scott tentang resistensi sebagai praktik tersembunyi, Foucault tentang relasi kuasa dan disiplin yang tak selalu efektif, serta Bourdieu tentang peran habitus dan struktur dalam membentuk tindakan sosial.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kebijakan pengurangan plastik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan, tetapi sebagai hasil dari interaksi antara struktur sosial, kondisi ekonomi, dan cara negara mendistribusikan kekuasaan serta pengetahuan. Bentuk-bentuk resistensi yang bersifat sehari-hari, selektif, simbolik, dan taktis mencerminkan respons masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak komunikatif, dan tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan.

Secara teoretis, hasil ini memperkuat argumentasi Scott tentang resistensi sebagai praktik tersembunyi, Foucault tentang relasi kuasa dan disiplin yang tak selalu efektif, serta Bourdieu tentang peran habitus dan struktur dalam membentuk tindakan sosial.

Untuk itu, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi partisipatif dengan masyarakat, khususnya kelompok pedagang kecil dan warga di pasar tradisional, melalui penyuluhan langsung dan forum warga.
2. Kebijakan pengurangan plastik perlu disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti tempat sampah terpilah dan sistem pengangkutan yang konsisten.
3. Perlu dikembangkan model insentif ekonomi yang realistis bagi masyarakat agar pemilahan sampah dan penggunaan alternatif plastik menjadi lebih menarik dan terjangkau.
4. Pendekatan represif sebaiknya dikurangi dan digantikan dengan strategi yang mengutamakan pemahaman, pembinaan, dan pelibatan warga secara aktif dalam desain kebijakan lingkungan.

Dengan memahami resistensi sebagai bagian dari dinamika sosial, kebijakan lingkungan dapat diarahkan pada transformasi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyanti, N. P. A. (2021). Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pelarangan plastik di Bali: Studi sosiologis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 145–158.
- Armadi, I. G. N. (2021). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Bali: Antara idealisme dan realitas. *Jurnal Lingkungan dan Masyarakat*, 9(1), 33–47.
- Baaz, M., Lilja, M., & Vinthagen, S. (2017). Resistance studies as an academic pursuit. *Journal of Resistance Studies*, 3(1), 10–35.
- Bourdieu, P. (2020). *The logic of practice* (R. Nice, Trans.). Polity Press. (Original work published 1980)

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. (2024). Laporan tahunan pengelolaan sampah Provinsi Bali.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x>
- Ghosh, A. (2018). *The great derangement: Climate change and the unthinkable*. Penguin Books.
- Greenpeace Indonesia. (2021). Studi kasus penggunaan plastik di pasar tradisional dan sektor informal.
- Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. Duke University Press.
- Peluso, N. L. (2012). Political ecologies of war and forests: Counterinsurgencies and the making of national natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(3), 587–608.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2018). Peraturan Gubernur (Pergub) No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- Putri, A. R., & Yulianto, M. (2022). Kegagalan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat: Tinjauan dari perspektif tata kelola lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 24–39.
- Scott, J. C. (1993). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Sutanto, H. (2020). Kesenjangan informasi kebijakan di kalangan masyarakat marginal: Studi kasus sosialisasi lingkungan di perkotaan. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 89–103.
- Widiantara, I. M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di Bali: Antara retorika dan praktik. *Jurnal Ekologi Sosial*, 6(1), 59–74.